

INTISARI

Proses pembangunan nasional maupun daerah dari periode ke periode telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam keberhasilan tersebut masih tersisah persoalan-persoalan yang harus ditangani secara lebih serius, seperti masalah kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya akses terhadap teknologi dan informasi dan lain sebagainya, yang akibatnya masih terlihat adanya kesenjangan di berbagai sektor, baik antar wilayah maupun antar masyarakat. Untuk Propinsi Papua pada umumnya dan khususnya Kabupaten Fakfak hal ini disebabkan, karena luas wilayah dan isolasi wilayah yang mengakibatkan sentuhan pembangunan belum dapat terlihat sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian perlu adanya perhatian dan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan pembangunan tersebut. hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah pembangunan tersebut tidak menjadi hambatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah. Salah satu alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan pembangunan tersebut adalah melalui pemekaran wilayah. Dengan demikian masalah pemekaran wilayah Kabupaten Fakfak merupakan masalah yang sangat tertarik untuk dibicarakan..

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, teori-teori yang digunakan adalah teori tentang pengembangan wilayah, teori desentralisasi, dan teori pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam, sedang analisis datanya melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun berdasarkan pengalaman empiris penulis.

Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut : Pertama, munculnya kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Fakfak, dilatarbelakangi oleh luas wilayah dan isolasi wilayah, serta terbatasnya sarana dan prasarana publik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, sehingga terlihat masih ada ketimpangan di berbagai sektor khususnya pada daerah (distrik) yang jauh dari pusat pemerintahan. Kedua, ketimpangan antar kecamatan tersebut membuat adanya perhatian dari para stakeholders, sehingga adanya tekanan terhadap pengambil kebijakan, agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi/dapat diatasi lewat pemekaran wilayah. Ketiga, Adanya intervensi baik dari pemerintah propinsi maupun pemerintah (pusat) terhadap pengambilan keputusan terhadap pemekaran wilayah ini merupakan keputusan politik dan keputusan akhir yang merupakan kewenangan pemerintah, yang telah dipertimbangkan, sehingga pemekaran wilayah tersebut dapat dilaksanakan. Keempat, Secara yuridis maupun administratif pemekaran Kabupaten Fakfak/pembentukan Kabupaten Kaimana dapat dikatakan layak, karena dari hasil penelitian/studi berdasarkan kriteria dan syarat sebagaimana diatur dalam PP.126/2000, dapat dikatakan lulus, sehingga terbentuknya Kabupaten Kaimana bersamaan dengan 13 kabupaten lainnya di Propinsi Papua yang dikukuhkan lewat UU. No. 26/2002.

Kata Kunci : *Isu disparitas antar kecamatan – Tekanan Stakeholders – Desentralisasi Kewenangan – Pemekakaran Wilayah*

Abstract

National development Process and also area of period to period have shown result of seething with excitement, but undeniable, that in the efficacy still remain problems which have to handled morely serious, like problem of poorness, low quality of human resource, its minim access to information and technology and others, which as a result still seen the existence of difference in various sector, like between region and also between society. For the Province of Papua in general and specially for Sub-Province of Fakfak, this matter caused, because of wide regional insulation and region which result development touch not yet earned seen as which expected. Thereby need the existence of way out and attention to development problems. These matters require to be conducted so those problems of the development not become resistance in course of management of governance at the time of area autonomous. One alternative to answer problems of the development is region extension. Thereby the problem of extension region in Sub-Province of Fakfak represent problem is very interest to be discussed.

To answer the target of research, theorys the used is theory about development of region, decentralization theory, and theory extension of region. This research used descriptive research method, with approach qualitative, data collecting technically pass observation, documentation, and circumstantial interview, is analysing its data pass interpretation pursuant to intellectual understanding which woke up pursuant to experience of writer empiric.

Conclusion of this research shall be as follows: First, appearance policy of extension region Sub-Province of Fakfak, background by wide of region and regional insulation, and also the limited public facilities and basic facilities in running function service of public, so that seen lameness there is still in various sector specially at area (district) which far from governance center. Both, lameness between the districts make the existence of attention from stakeholders, so that the existence of pressure to taker of policy, in order to the lameness can lessen/can overcome by extension of region. Third, Existence of intervention either from government of government and also province (center) to decision making to this region extension is politics decision and final decision which represent of government competence, which have been considered, so that region extension can be executed is. Fourth, By juridical although administrative region extension of Sub-Province of Fakfak /forming of Sub-Province of Kaimana can be told is competent, because from result of research/study pursuant to condition and criterion as arranged in PP. 126/2000, can be told to pass, so that forming of Sub-Province of Kaimana at the same time by 13 other sub-province in Province of Papua confirmed by UU. No.26/2002.

Keyword: Disparities Issue between District - Pressure of Stakeholders - Authorities Decentralize - Regional Extension.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis pemekaran Kabupaten Fak-fak Propinsi Papua
SIRFEFA, Hamid, Prof.Dr. Riswandha Imawan
Universitas Gadjah Mada, 2005 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>